

**KOMUNIKASI LINGKUNGAN
DALAM MENGEMBANGKAN HUTAN BERKELANJUTAN**

Ch.Herutomo

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman

Email : christoherutomo@gmail.com

Abstract

Sustainability of the forest as a part of sustainability development was marked by the function of sustainability of ecology and the function of economical forestry. The economical function was maintain the forest as environment empowerment and economical function as the forest reformation demand could be enrich the community. Sustainability of the forest was demanding the availability of awareness and community participation in managing forestry. The awareness and community participation could be arosed by environment communication. Because environment communication is a pragmatic media and the constructive one in order to give the understanding to the community. It is important to manage the sustainability of the forest. Environment communication could be held by interpersonal communication, group communication or mass media such as printed, electronic, and social media.

Keywords : *environment communication, sustainability of forest*

I. PENDAHULUAN

Komunikasi lingkungan untuk pertama kalinya diperkenalkan pada pada tahun 1960-an dan dipopulerkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada tahun 1992 di Rio Janiero Brasil yang mengkaitkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan komunikasi.

Membahas hutan berkelanjutan tidak bisa dipisahkan dari komunikasi lingkungan karena hutan berkelanjutan yang ditandai dengan keberlanjutan fungsi ekologi dan ekonomi hutan bagi masyarakat. Fungsi

ekologi hutan adalah terpenuhinya hutan sebagai daya dukung lingkungan seperti pencegah tanah longsor, banjir dan kekeringan sedangkan fungsi ekonomi hutan adalah melalui produk hutan kayu maupun non kayu bisa mensejahterakan masyarakat. Keberlanjutan kedua fungsi hutan tersebut tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dalam turut mengelola hutan. Partisipasi masyarakat itu salah satunya dapat ditumbuhkan melalui komunikasi lingkungan karena komunikasi komunikasi lingkungan mulai dari unsur, media dan prosesnya

bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan, atau dengan kata lain komunikasi lingkungan merupakan media pragmatis dan konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut mengelola lingkungan. Komunikasi lingkungan yang bentuknya komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan melalui media massa sebagai salah satu *civil society* dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pemberitaan yang investigative tentang masalah sumber daya hutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya hutan produksi dapat merubah struktur dan fungsi hutan produksi yang dikembangkan melalui konsep "*social forestry*" atau di Indonesia diadopsi melalui konsep Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHBM) yang dilakukan oleh PERHUTANI. Perubahan struktur hutan melalui PHBM yang dimulai pada era reformasi tahun 1998 adalah hutan yang tadinya hanya dikelola oleh negara, yang sering menimbulkan antagonisme antara negara dengan masyarakat dan terjadinya penjarahan hutan besar-besaran karena faktor kemiskinan waktu itu, berubah menjadi pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat desa hutan.

Perubahan fungsi hutan lebih banyak memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui sharing produk hutan baik kayu maupun non kayu yang dilakukan melalui konsep PHBM.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan atau juga disebut "*sustainable development*" yang menggambarkan adanya saling ketergantungan antara pembangunan dan lingkungan telah setengah abad menjadi perhatian serius dari banyak negara-negara didunia. (Soemarwoto,1991).

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai proses pembanguan yang tidak boleh melampaui daya dukung lingkungan termasuk hutan sehingga fungsi ekologi dan ekonomi lingkungan selalu dapat terjamin, maka pengelolaan sumberdaya alam harus selalu mengacu aspek pelestarian lingkungan dan konservasi maka eksploitasi sumber alam demi kepentingan ekonomi semata akan merusak daya dukung lingkungan.(Soerjani, 1997).

Hutan sebagai salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui sudah tidak lagi hanya sekedar sebagai sumber pangan tetapi sebagai sumber pendapatan dan kegiatan ekonomi yang sangat menguntungkan. Kenyataan hutan telah menjadi sumber kegiatan ekonomi adalah adanya penjarahan

lahan hutan atau perencikan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena kemiskinan dan kerentanan sosial, dalam skala besar terjadinya *illegal logging* atau pengalihan fungsi lahan hutan untuk kepentingan ekonomi yang dilakukan cukong besar yang sering main kong kalingkong dengan penguasa.

Terjadinya penjarahan lahan hutan, pengalihan fungsi lahan hutan *illegal logging* telah memberikan kontribusi yang sangat besar terjadinya degradasi dan deforestasi hutan. Besarnya degradasi dan deforestasi hutan jelas berpengaruh besar terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan.

Dalam tiga tahun terakhir setelah krisis ekonomi tahun 1998 (Stevens, 2001) hutan di pulau Jawa kerusakannya makin parah, diperkirakan 350 ribu hektar dalam pengelolaan Perum Perhutani dalam kondisi kritis, apalagi kalau dihitung kerugian dari aspek lingkungan seperti kuantitas dan kualitas air terganggunya habitat flora fauna dan makin terpinggirkannya masyarakat sekitar hutan.

Data Kementerian Kehutanan RI (2009) hutan rusak dan lahan kritis yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) di pulau Jawa mencapai 3, 2 juta hektar dan sekitar 0,6 juta hektar berada dalam kawasan hutan negara atau 22 % dari seluruh kawasan hutan negara. Secara nasional laju kerusakan hutan periode

2003 – 2006 mencapai 1,17 hektar pertahun, sedangkan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan mensinyalir sebanyak 21 % atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga sudah tidak punya tegakan pohon lagi yang artinya 26 juta hektar di Indonesia telah hilang.

Melihat kondisi kerusakan hutan yang mengkhawatirkan yang dialami oleh negara-negara pada umumnya jelas akan merusak daya dukung hutan yang dapat menurunkan fungsi ekologi dan ekonomi hutan dan menjauhkan dari konsep hutan berkelanjutan maka muncul inovasi kehutanan yang disebut dengan *social forestry* yaitu sebuah konsep pengelolaan hutan yang berbasis komunitas atau dikenal sebagai *co-management*. Pengelolaan hutan yang berbasis komunitas akan memerlukan aturan-aturan hukum yang menjadi kajian hukum lingkungan dan membutuhkan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu kajian ilmu komunikasi dan sosiologi.

Implementasi komunikasi lingkungan melalui kelembagaan yang salah satunya adalah Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (FK PHBM) yang dikelola oleh PERHUTANI . Dalam Forum Komunikasi tersebut terjadi kolaborasi antara Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan

(MDH), *Stakeholder* dan Pemerintah setempat. Efektivitas Forum Komunikasi ini sangat dipengaruhi lingkungan sosial, budaya, politik dan pemerintah setempat dimana forum komunikasi itu berada. Seperti konsep *synomorphousfit* dalam (Yusuf, 1991) bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya saling menyesuaikan, konsep ini mengarah pada limitasi atau pembentukan perilaku alternatif bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya menumbuhkan *congruence behavior*. Pada sisi lain proses interaksi manusia dengan lingkungannya dapat dipahami dalam konsepnya Emery dan Trist dalam (Yusuf, 1991) bahwa relasi manusia dengan lingkungannya sebagai suatu *transactional interdependency* artinya relasi manusia dengan lingkungannya ada saling ketergantungan.

Komunikasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari komunikasi pembangunan berkelanjutan telah dikenal yang telah dikenal sejak tahun 1960 an merupakan segala upaya dan cara serta tehnik penyampaian gagasan dan ketrampilan dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memahami, menerima dan berpartisipasi (Fatonah, 2008).

Komunikasi lingkungan untuk

keberlanjutan hutan tidak hanya melalui komunikasi kelembagaan seperti Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama (FK PHBM) atau Forum Komunikasi Masyarakat Kehutanan tetapi juga memanfaatkan komunikasi lewat media massa. Seperti adanya kesepakatan untuk mengembangkan dan memanfaatkan komunikasi dan informasi melalui media sebagai salah satu konsep pembangunan berkelanjutan yang direkomendasikan oleh Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan di Yogyakarta tahun 2004 (Hardjasoemantri, 2005).

Pola komunikasi lingkungan terjadi secara interaktif atau dialogis bukan hanya sekedar menyediakan dan menyebarluaskan informasi lingkungan. Media massa sebagai bagian dari *civil society* diperlukan sekali dalam upaya pengelolaan lingkungan termasuk hutan. Undang – Undang no 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah menetapkan bagaimana keterkaitan media massa dan pengelolaan lingkungan yang meliputi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah juga dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan maka ada Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi

daerah yang mengatur good governance dalam pengelolaan lingkungan berupa *good environmental governance* yang meliputi visi antara lain transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum .

II. KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Komunikasi lingkungan menurut (Robert Cox , 2010) merupakan media pragmatis dan konstruktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lingkungan. Menyangkut strategi pengemasan pesan dalam media untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Komunikator utama dalam komunikasi lingkungan adalah pemerintah dan organisasi non pemerintah yang punya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Pada dasarnya komunikasi lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan termasuk hutan polanya bersifat dialogis yang lebih banyak terjadi pada komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Menurut (Wiryo, 1998) pola komunikasi dibentuk untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan unsur-unsur yang relevan dari suatu proses komunikasi khususnya komunikasi interpersonal. Pola komunikasi adalah representasi dari suatu

peristiwa komunikasi yang dapat digunakan untuk melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi. Sedangkan sejauh mana efektivitasnya tergantung bagaimana relevansi antara pola komunikasi yang dipakai dengan kondisi sosial, budaya dan psikologis khalayak. Komunikasi yang efektif (Susanto ,1989) dapat dilihat dari prosentase antara khalayak yang dapat dipengaruhi dengan khalayak peserta komunikasi, disamping itu efektivitas komunikasi juga dapat diukur dari efek pada khalayak yang berupa kognitif, afektif, konatif dan efek sosial meliputi difusi inovasi, opini publik, akulturasi serta perubahan sosial ekonomi. Komunikasi yang efektif jika terjadi dalam suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan pesannya menggugah perhatian dan minat komunikan. Severin dan Tankard dalam (Wiryanto, 1998) berpendapat pola komunikasi dapat membantu merumuskan suatu teori dan menyarankan suatu bentuk relasi. Pola komunikasi mempunyai tiga proses (1) menggambarkan proses komunikasi (2) menunjukkan hubungan visual (3) membantu menemukan dan memperbaiki hambatan komunikasi dan fungsinya dalam (Sendjaya , 1999) mempunyai empat fungsi yaitu (1) pengorganisasian (2) penjelasan (3) *heuristic*, yang memberikan gambaran mengenai unsur-

unsur pokok dari suatu proses atau sistem dan (4) prediksi akibat yang terjadi.

Secara empiris aspek komunikasi lingkungan dan kebijakan lingkungan mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi karena komunikasi lingkungan tidak hanya menginformasikan secara linier ataupun *bottom up* mengenai masalah lingkungan tetapi lebih pada sharing informasi lingkungan secara dialogis. Disamping itu fungsi komunikasi lingkungan menyampaikan tuntutan (*policy demand*) masyarakat dalam pengelolaan lingkungan termasuk masalah hutan.

Keterkaitan media massa dengan pengelolaan lingkungan dapat ditinjau dari konsep *good gavernance* yang mensyaratkan adanya partisipasi dan transparansi yang kedua hal tersebut dapat dilakukan oleh komunikasi melalui media massa. Sebagai *civil society* media massa berperan penting dalam pengelolaan lingkungan diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, yaitu hak masyarakat akan informasi lingkungan diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “ setiap orang punya hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan. Dari beberapa peraturan tersebut komunikasi lingkungan dapat dipahami sebagai suatu

proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau antara perusahaan dengan *stakeholder* dalam mengembangkan mutualisme yang berkesinambungan untuk mengembangkan hutan berkelanjutan .

III. KOMUNIKASI LINGKUNGAN SECARA KELEMBAGAAN

Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (FK PHBM) merupakan proses komunikasi lingkungan untuk mengembangkan hutan berkelanjutan. Secara kelembagaan forum komunikasi ini lebih banyak sebagai proses komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok merupakan pendekatan kolaboratif atau silahurami yang berbasis pada masyarakat desa hutan, sebagai pendekatan kolaboratif melibatkan Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan (MDH), *stakeholder* dan Pemerintahan .

Dilihat dari komunikasinya terjadi dalam komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang polanya bersifat dialogis atau interaktif, saling mempengaruhi sebagai awal ikatan psikologis antara MDH dengan Perum Perhutani. Ikatan psikologis ini merupakan proses sosial untuk mengembangkan hutan berkelanjutan dengan berbagi peran dan tanggungjawab masing-masing, sedangkan sebagai proses sosial dipengaruhi oleh proses komunikasi dan faktor sosial budaya.

Dalam komunikasi lingkungan yang efektif harus dapat memberi harapan atau keinginan yang berorientasi masa kini maupun masa mendatang maka dalam Forum Komunikasi PHBM harapan dan keinginan tersebut diwujudkan dalam hutan yang lestari atau berkelanjutan. Hutan yang lestari atau berkelanjutan tersebut dapat terwujud bila masyarakat desa hutan tumbuh kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan atau hutan berkelanjutan dengan tidak mereneck atau merambah hutan, sehingga fungsi ekologi dan ekonomi hutan bagi masyarakat desa hutan terus dapat terjamin.

Efektivitas forum komunikasi ini terletak pada sifat komunikasi yang dialogis, umpan balik dan komunikatornya mengetahui komunikasinya berhasil atau tidak yang komunikatornya tokoh masyarakat desa hutan yang berfungsi sebagai *change agent*. Pengaruh *change agent* cukup besar dalam mengendalikan perilaku masyarakat desa hutan yang kemudian menjadi perilaku yang ajeg akan pentingnya kelestarian hutan yang berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui sharing hasil hutan seperti jati, pinus, akasia.

Dalam Forum Komunikasi yang terjadi dalam rembug desa hutan yang dilaksanakan secara berkala disampaikan informasi yang berupa (1) *informational message* seperti

pemberitahuan tentang masalah hutan (2) *instruksional message* seperti perintah untuk menanam tanaman di bawah tegakan dengan sistem tumpang sari dan (3) *motivational message* seperti meningkatkan kesadaran akan kelestarian hutan. (Herutomo, 2010)

Masyarakat desa hutan rata-rata berpendidikan rendah maka informasi yang disampaikan dalam Forum Komunikasi agar mudah dimengerti maka menggunakan “rekayasa pemahaman“ sesuai kapasitas masyarakat desa hutan yaitu menggunakan (1) lambang, interpretasi cara lain untuk menyampaikan pesan (2) rujukan, menunjukkan obyek, peristiwa, benda (3) Interpretasi, ukiran untuk melihat lambing atau hal yang diwakili lambang.

akan dibangun atau dipelihara dan dalam perspektif fungsionalisme, komunikasi dimaksudkan untuk membangun dan memelihara harmoni sosial.

Proses komunikasi lingkungan dalam forum terjadi (1) perilaku spontan, terjadi secara tiba-tiba, serta merta tanpa berpikir mendalam dulu yang sering menimbulkan gelak tawa (2) perilaku *scripted* karena dorongan faktor kebiasaan seperti nampak dalam logat atau dialek (3) perilaku *contrived*, dipengaruhi motif kognitif dan sikap rasionalitasnya seperti tidak asal bunyi.

Sebagai media dan wadah kolaborasi komunikasi forum PHBM dapat memberi keuntungan antara lain (1) sebagai wadah pertukaran informasi antara *stakeholder*, Perum Perhutani dan LMDH yang dapat memberi mekanisme menyelesaikan masalah kehutanan yang kurang pasti (2) mengambil keputusan efektif yang fokusnya pada masalah bersama (3) mengendalikan kebijakan melalui koordinasi lintas sektoral (4) mengembangkan kapasitas kelembagaan Perhutani, LMDH, *stakeholder* dan pemerintah setempat.

Sebagai fungsi kelembagaan komunikasi forum PHBM belum berfungsi secara maksimal karena beberapa faktor antara lain (1) kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara para pelaku PHBM seperti Perhutani, LMDH, *stakeholder*, pemerintah setempat dalam menghadapi masalah kehutanan (2) kurang lancarnya proses negosiasi antara Perhutani, LMDH, *stakeholder* dan pemerintah setempat (3) belum adanya konsep kemitraan yang ideal diantara para pelaku PHBM dalam menghadapi masalah kehutanan seperti dalam sharing produksi hutan, pencurian kayu. (Herutomo,2010)

IV. MEDIA DAN INFORMASI LINGKUNGAN

Komunikasi lingkungan tidak hanya

terjadi dalam konteks kelembagaan seperti dalam forum-forum komunikasi masyarakat desa hutan tetapi juga melalui media massa sebagai salah satu *civil society* yang melalui pemberitaannya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang lebih luas akan pentingnya pengelolaan hutan. Berkenaan dengan itu maka Konferensi Nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2004 di Yogyakarta merekomendasikan komunikasi dan informasi dimasukkan dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan. Implikasi dari rekomendasi itu adalah media massa cetak maupun elektronik mempunyai peranan cukup besar dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan termasuk hutan.

Menurut studi Ader dalam (Kurniawan, 2006) yang mengkaitkan berita lingkungan di media massa dengan pendapat khalayak, menyimpulkan media massa dapat melakukan pencerahan masalah lingkungan terhadap masyarakat dan memperkuat upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup di Inggris.

Menurut Atmakusumah dalam (Kurniawan, 2006) media massa memberi kontribusi dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan

melalui berita-beritanya. Lembaga Pers Dr. Soetomo dalam (Atmakusumah, 1996) menyatakan media massa bisa berperan dalam pengelolaan lingkungan sebagai berikut (1) menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan (2) sebagai sarana pendidikan tentang pengelolaan lingkungan (3) sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan lingkungan. Menurut Assegaf (Assegaff, 1996) pemberitaan tentang lingkungan harus lebih pada jurnalistik proses yaitu pemberitaan yang tidak hanya sekedar mengangkat fakta tetapi lebih bersifat investigasi, mendalam atau *in – depth reporting*.

Menurut Friedman dalam (Atmakusumah, 1996) untuk membuat berita tentang lingkungan yang bersifat *in – depth reporting* maka beritanya harus dapat menjawab empat pertanyaan yaitu *what, who, why* dan *how*. Liputan banjir bandang misalnya, bukan hanya mencari “apa yang terjadi” tetapi juga : persoalan yang timbul, bagaimana solusinya, siapa yang terkena dampak.

V. HUTAN BERKELANJUTAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana

diamanatkan konstitusi tersebut maka hutan sebagai bagian dari bumi dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan sebagai salah satu modal pembangunan nasional mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan rakyat Indonesia baik manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ditetapkan bahwa hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat maka hutan harus dijaga daya dukungnya secara keberlanjutan, diurus dengan akhlak mulia, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas keterbukaan dan asas keterpaduan.

Status dan fungsi hutan diatur dalam pasal 5 sampai dengan 9 Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999. Tentang status hutan diatur dalam pasal 5 bahwa status hutan terdiri hutan negara dan hutan hak, sedang fungsi hutan diatur dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan hutan mempunyai fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Selain pembagian hutan berdasarkan fungsinya pemerintah dapat menetapkan kawasan

hutan tertentu untuk tujuan khusus untuk kepentingan umum seperti untuk pendidikan, penelitian, latihan dan penetapan untuk tujuan khusus ini tidak boleh mengubah fungsi pokok hutan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang no 41 tentang Kehutanan.

Pengelolaan hutan lestari (Perhutani, 2002) pada dasarnya meliputi tiga aspek yaitu : ekonomi (produksi), sosial budaya dan lingkungan secara proporsional yang pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang diakui secara internasional. Pengakuan atas pemenuhan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional independen yaitu *Forest Stewardship Council (FSC)* berupa ekolabel yang dilekatkan pada produk hutan yang menandakan bahwa perusahaan telah memenuhi prinsip, kriteria pengelolaan hutan berkelanjutan.

Secara empiris pengembangan hutan berkelanjutan menurut (Perhutani, 2002) didasari karakteristik permasalahan hutan yang dihadapi dan pengalaman panjang dalam mengelola hutan yaitu :

1. *Community Based Forest Management (CBFM)* , pengelolaan hutan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi aktif mulai dari

perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan hutan dimana ketiga prinsip tersebut oleh Perum Perhutani dijabarkan dalam program PHBM .

2. *Resources Based Forest Management*, usaha Perum Perhutani tidak semata-mata memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya tetapi juga mengelola ekosistem dan seluruh sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun di permukaan seperti air, galian C, agrobisnis yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat .

3. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam seluruh aspek pengelolaan hutan, artinya bahwa seluruh aktivitas pengelolaan hutan harus memenuhi unsur asas transparansi, fairness, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran serta bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) untuk perbaikan manajemen yang dapat menjamin keberlanjutan hutan.

Membahas hutan berkelanjutan secara akademik tidak bisa dipisahkan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang menurut (Budiahardjo, 1999) menyebutkan pembangunan berkelanjutan berupa terpeliharanya “ *total natural stock* “ pada tingkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sekarang. Konsep ini sejalan dengan dengan pengertian

masyarakat berkelanjutan yang artinya sebagai masyarakat yang hidup dalam batas-batas lingkungan yang saling mendukung.

Salah satu elemen yang paling penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan menurut (Hashanu, 1998) adalah konsep kelestarian hutan (*sustained forestry*), konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Carlowitz pada tahun 1713 tetapi baru dikembangkan secara sistematis pada pertengahan kedua abad 18 di Eropa Tengah.

Sejak pertama kali diperkenalkan sampai sekarang rumusan hutan berkelanjutan telah mengalami perkembangan dan bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Pada awalnya hutan disebut berkelanjutan bila tebangan tahunan atau periodik tidak mengurangi kapasitas hasil dan bila setelah penebangan dilakukan di kawasan hutan potensi tegakan di kawasan tidak berkurang dibanding sebelum dilakukan penebangan.

Konsep keberlanjutan hutan yang dilakukan oleh negara-negara umumnya sekarang ini mempunyai dimensi yang lebih luas yaitu memenuhi aspek ekologi, sosial ekonomi, territorial bagi masyarakat, orientasi yang hanya semata mengutamakan produk hutan secara periodik sudah ditinggalkan.

VI. KESIMPULAN

1. Pengembangan hutan melalui pendekatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dapat berkorelasi positif dengan keberlanjutan sumberdaya hutan, karena masyarakat mempunyai *sense of belonging* yang makin tinggi terhadap hutan sehingga merubah pola pikir masyarakat bahwa hutan harus dilestarikan bukan lagi dirusak .
2. Komunikasi lingkungan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara kelembagaan seperti FK PHBM merupakan forum kolaboratif yang berfungsi sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait untuk mengembangkan hutan berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat .
3. Komunikasi lingkungan melalui media massa cetak, elektronik dan media sosial dengan pemberitaan yang investigatif tentang masalah kehutanan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut mengelola hutan berkelanjutan. Disamping itu media massa dan media sosial juga dapat merupakan sarana pendidikan dan sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, DH , 1996, *Jurnalistik Masa Kini ke Praktek Kewartawanan Indonesia*, Ghalia Indonesia , Jakarta.
- Atmakusumah, 1996, *Mengaangkat Lingkungan Ke Media Massa*, Lembaga Pers Dr.Soetomo dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Fatonah Siti , 2008, *Difusi Inovasi Tehnologi Tepat Guna di Kalangan Wanita Pengusaha di Kasongan Yogyakarta*, *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 6 Universitas Veteran Yoyakarta*
- Hafied , 1999, *Menyelematkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Hashanu Simon, 1998, *Hutan Jati Dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya* , Aditya Media , Bandung
- Herutomo, Ch, 2010 *Tesis : Efektivitas Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mengembangkan Hutan Berkelanjutan di KPH Banyumas Timur*, Program Magister Ilmu Lingkungan , Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Kurniawan, Eko, 2006, *Tesis : Studi Analisa Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka*, Program Magister Ilmu Lingkungan , Universitas Diponegoro , Semarang
- Robert Cox, 2010, *Environmental Communication And Public Sphere* , SAGE Publication, Inc .
- Santosa, 2000, *Komunikasi Pembangunan* , Alumni , Bandung .
- Stevens , B, 2001, *Community Forestry Solusi Nyata*, *Journal Community Forestry VOL 4* .
- Susanto, Astrid , 1989, *Komunikasi Kontemporer*, Binacipta , Bandung .
- Sendjaya S , 1999, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta .
- Soerjani, 1997, *Pembangunan dan Lingkungan Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta .